

DILEMATISM: PRINCIPAL'S MANAGERIAL STRATEGIES IN REALIZING THE COVID-19 VACCINATION PROGRAM IN ELEMENTARY SCHOOL

Hamna¹, Muh. Khaerul Ummah BK²

¹Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Madako Tolitoli, Indonesia.

²Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Madako Tolitoli, Indonesia

Korespondensi Penulis. Email : anhahamna70@gmail.com

ABSTRAK

Faktor jaminan keselamatan dari bahaya Covid-19 akan memengaruhi aksesibilitas layanan pendidikan anak di Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta dibalik peran kepala sekolah dalam upaya merealisasikan kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 di Sekolah Dasar yang masih menuai kontroversi di kalangan orang tua/wali siswa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif *analisis deskriptif ex post facto* dengan responden penelitian meliputi kepala sekolah tingkat sekolah dasar/ sederajatnya se-Kab. Tolitoli dan orang tua/wali siswa. Fokus penelitian secara khusus meliputi seluruh sekolah swasta pada jenjang sekolah dasar/ sederajatnya yang ada di Kab. Tolitoli yang berjumlah 26 sekolah. Hasil penelitian menunjukkan: (a) Ada 12 sekolah telah mensosialisasikan kebijakan vaksinasi tersebut di satuan pendidikannya (46,15%); (b) Terdapat 8 sekolah masih sebatas ragu-ragu (30,77%); dan (c) Terdapat 6 sekolah belum mensosialisasikan (23,08%). Strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah diantaranya: (1) Strategi sosialisasi program vaksinasi Covid-19 yang aman dengan menghadirkan pihak kepala sekolah berserta jajarannya, tenaga medis, dan orang tua/wali siswa; (2) Analisis situasi dan evaluasi program aman vaksinasi bagi anak; (3) Kepala sekolah sebagai motivator. Dilematisme tingkat ketidakpercayaan orang tua/wali siswa akan jaminan keselamatan efektivitas vaksinasi anaknya sebesar 88,73% dengan mempertimbangkan karakter anak masih di bawah umur dan 11,27% merespon baik pemberlakuan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Strategi Manajerial Kepala Sekolah, Aksesibilitas Layanan Pendidikan, Vaksinasi Covid-19; Sekolah Dasar

ABSTRACT

The factor of guaranteeing safety from the dangers of Covid-19 will affect the accessibility of children's education services in elementary schools. This study aims to reveal the facts behind the role of school principals in an effort to realize government policies related to the Covid-19 vaccination program in elementary schools which are still reaping controversy among parents/guardians of students. The research approach used is a qualitative descriptive ex post facto analysis with research respondents including principals at the elementary school level/equivalent throughout the district. Tolitoli and parents/guardians of students. The focus of the research specifically covers all private schools at the elementary/equivalent level in Kab. Tolitoli, totaling 26 schools. The results showed: (a) There were 12 schools that had socialized the vaccination policy in their education units (46.15%); (b) There are 8 schools

that are still in doubt (30.77%); and (c) There are 6 schools that have not socialized (23.08%). The strategies implemented by the school principal include: (1) a strategy for socializing the safe Covid-19 vaccination program by presenting the principal and his staff, medical personnel, and parents/guardians of students; (2) Situation analysis and evaluation of safe vaccination programs for children; (3) The principal as a motivator. The dilemma of the level of distrust of parents/guardians of the safety guarantee for the effectiveness of their child's vaccination is 88.73% taking into account the character of the child being underage and 11.27% responding favorably to the implementation of the policy.

Keywords: *Dilematism Covid-19 Vaccination; Principal's Managerial Strategies; Elementary School*

PENDAHULUAN

Sejak awal tahun 2020, Indonesia mulai digemparkan pemberitaan penyebaran virus Covid-19 walaupun pada mulanya virus tersebut telah ada sejak tahun 2019 di Kota Wuhan, China (Kwok et al., 2022). Kasus kemunculan Covid-19 di Indonesia pertama kali diketahui pada bulan Maret 2020 setelah didapatkan dua orang warga Depok yang terkonfirmasi tertular Covid-19 pasca berinteraksi dengan warga asal Jepang (Putri et al., 2021).

Dampak yang ditimbulkan dari penyebaran Covid-19 begitu dahsyat sebab melanda hampir seluruh sektor kehidupan yang ada di negeri ini (Coleman et al., 2022). Bukan dampak yang menguntungkan yang didatangkannya melainkan dampak yang buruk, yang tak terkecuali menghambat laju perkembangan di sektor dunia pendidikan.

Persebaran Covid-19 di Indonesia diperkirakan akan terus menimbulkan beban morbiditas dan mortalitas yang sangat mengganggu aksesibilitas sektor kehidupan manusia, salah satunya akan menghambat akses layanan kegiatan pendidikan formal di semua jenjang pendidikan. Hal ini sebagaimana telah diberitakan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 30 Januari 2020, persebaran COVID-19 dinyatakan sebagai darurat kesehatan masyarakat level enam yang kemudian menjadi perhatian dunia internasional. Pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 secara resmi menjadi pandemi yang berbahaya dengan persebaran yang begitu cepat mengancam keselamatan manusia yang dalam waktu yang singkat ditandai begitu banyak manusia menjadi korban keganasan wabah virus Covid-19 ini di berbagai negara termasuk di Indonesia hingga saat ini (Ikbal, 2022).

Sedari awal pemahaman sebagian masyarakat terkait virus Covid-19 dipandangnya sebatas siasat berbau politisme pemerintah semata yang setiap harinya diberitakan pada sebagian besar media pertelevisian dan media-media sosial lainnya. Namun di sisi yang berbeda, sebagian masyarakat juga memandang kehadiran Covid-19 tersebut memang nyata adanya sebab disertai oleh banyaknya fakta empirik di lapangan yang terang-terangan mengancam keselamatan jiwa manusia. Tingkat kematian akibat Covid-19 di Indonesia yang dirilis pada 20 September 2021 mencapai 3,35%. Besaran persentase kematian ini menunjukkan sekitar 140.805 orang yang meninggal dunia akibat Covid-19. Jumlah kasus kematian ini menempatkan kasus kematian

akibat Covid-19 di Indonesia berada pada peringkat kedua tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Akibat dari keganasan Covid-19 ini, telah banyak kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dituangkan melalui surat keputusan tentang penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Termasuk regulasi terbaru yang ditetapkan di akhir tahun 2021 yakni ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 mengenai pemberlakuan kebijakan vaksinasi bagi Anak Usia 6 sampai 11 Tahun (Kemenkes, 2021).

Sebelumnya program vaksinasi ini hanya diperuntukkan bagi aparatur negara dan masyarakat sipil yang menimbulkan kesan ada indikasi pemaksaan spekulatif yang terselip dotrinisasi pembatasan akses layanan administratif kepegawaian dan kemasyarakatan. Begitu juga sejak ditetapkannya program vaksinasi anak yang dicanangkan oleh pemerintah turut menimbulkan beragam tanggapan dilematis di masyarakat.

Pemberlakuan kebijakan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun melalui keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2021 dengan berdasar pada rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional Indonesia (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*) melalui surat nomor 166/ITAGI/Adm/XII/2021 tanggal 9 Desember 2021. Dari hasil kajian vaksinasi Covid-19 oleh ITAGI pada dasarnya menetapkan vaksinasi Covid-19 dapat diberikan pada anak usia 6 sampai 11 tahun (Yarman et al., 2022). Realisasi dari keputusan ini oleh sebagian masyarakat mengandung spekulasi dogmatis dalam kaitannya untuk kelancaran aksesibilitas layanan pendidikan formal di seluruh satuan pendidikan yang sebagaimana sudah mulai disosialisasikan dan diberlakukan.

Sasaran utama dari pemberlakuan kebijakan vaksinasi anak sesuai regulasi Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 terutama mengarah pada para siswa jenjang pendidikan sekolah dasar/ sederajatnya, dengan mengintruksikan kepada pihak sekolah untuk membuka pos pelayanan vaksinasi anak di satuan pendidikan yang dikelolanya. Meski demikian, tetap saja menimbulkan penolakan bagi sebagian besar masyarakat terutama dari pihak orang tua/wali siswa. Ditambah lagi dengan maraknya pergerakan masyarakat aktivis anti vaksinasi yang telah mengampanyekan keragu-raguan akan efektivitas dan keamanan vaksinasi anak yang semakin menambah kekhawatiran orang tua/wali siswa akan keselamatan anaknya pasca divaksinasi (Astuti et al., 2021).

Memang benar bahwa penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik dan layak merupakan tanggung jawab dari negara dan menjadi hak setiap warga negara yang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Derivasi dari UUD 1945 kemudian ditegaskan secara khusus melalui Pasal 8 Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa: “Perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah” (Ginting et al., 2021).

Melalui pemberlakuan vaksinasi anak di jenjang pendidikan sekolah dasar, secara tidak langsung peran kepala sekolah selaku pemimpin sekolah yang akan bertanggung jawab akan keselamatan para siswanya (Prawoto et al., 2020) setelah menjalani vaksinasi demi menormalisasikan kelancaran layanan pendidikan di masa Covid-19. Dalam upaya menjamin layanan aksesibilitas pendidikan, setiap kepala sekolah hendaknya memiliki kekhasan tersendiri dalam memanajerisasi pengelolaan satuan pendidikan yang dipimpinnya (Rozi et al., 2021). Dalam rangka menjamin layanan pendidikan anak di masa pandemi Covid-19 ini, beragam strategi yang telah diterapkan oleh kepala sekolah yang menjamin keselamatan dan kesehatan anak, mulai dari kebijakan *Study From Home (SFH)* (Utamajaya et al., 2020), Pembelajaran tatap muka terbatas 50% dari kapasitas warga sekolah hingga penerapan kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi anak sekolah (Kartikawati et al., 2022).

Kehadiran kepala sekolah dituntut agar selalu menjadi seorang figur yang dapat menjadi penengah dengan memposisikan diri selaku pihak yang berwenang di setiap pengambilan keputusan strategis dan pemecahan masalah yang ada di sekolah. Dan kepala sekolah dapat menjadikan dirinya sebagai motivator sekaligus sumber informasi bagi warga sekolah yang dipimpinnya termasuk bagi orang tua/wali para siswanya (Muspawi, 2020). Mengingat hasil penelitian terdahulu menginformasikan bahwa determinasi sasaran vaksinasi Covid-19 untuk Provinsi Sulawesi Tengah disarankan agar berfokus pada orang dengan kelompok umur kurang dari 40 tahun (Ichsan et al., 2021).

Hal ini mengindikasikan bahwa ada kecenderungan realisasi program vaksinasi anak juga diperuntukkan untuk wilayah Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Tolitoli itu sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah (Tolitoli, 2021). Dari perspektif inilah kemudian mendasari dilaksanakannya penelitian dengan tujuan untuk mengetahui determinasi kesediaan orang tua/wali siswa melalui strategi manajerial kepala sekolah di sekolah dasar didalam merealisasikan program vaksinasi anak di masa pandemi Covid-19.

Apabila benar dengan pemberlakuan vaksinasi Covid-19 bagi anak sekolah usia 6 sampai 11 tahun dapat menjamin keselamatan anak dan terbukti aman serta efektif, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah, tim kesehatan masyarakat dan pihak kepala sekolah serta kelompok advokasi harus memberi edukasi kepada pihak orang tua/wali siswa guna menangkal keraguan dan kesalahan informasi tentang bahaya vaksin bagi anak. Penyebaran informasi yang salah secara massif seperti yang banyak beredar di media sosial (Yoma Bagus Pamungkas et al., 2022)pa, turut memberi dampak yang mengganggu bagi penerimaan masyarakat terhadap program vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun di sekolah dasar. Oleh karena itu, pihak kepala sekolah perlu memiliki otoritas didalam mengukur tingkat kesediaan orang tua/wali siswa untuk menerima program vaksinasi Covid-19 yang berpotensi aman dan efektif bagi anak-anaknya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif *analisis descriptive ex post facto* dengan responden penelitian meliputi kepala sekolah tingkat sekolah dasar/ sederajatnya se-Kab. Tolitoli dan orang tua/wali siswa. Fokus penelitian secara khusus meliputi seluruh sekolah swasta pada jenjang sekolah dasar/ sederajatnya yang ada di Kab. Tolitoli yang berjumlah 26 sekolah. Data responden dikumpulkan dari 26 Desember 2021 sampai 23 Mei 2022 dengan jumlah responden untuk kepala sekolah sebanyak 26 orang dan masing-masing dua responden dari pihak orang tua/wali siswa yang mewakili setiap sekolah dengan jumlah keseluruhan responden dari pihak orang tua/wali siswa sebanyak 52 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen angket dan pedoman wawancara. Kerahasiaan identitas kepala sekolah dan pihak orang tua/wali siswa yang menjadi responden data penelitian ini, tidak disebutkan dalam tulisan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat sekarang ini, pencegahan dan penanganan Covid-19 dalam dunia persekolahan telah memasuki tahap vaksinasi yang menasar pada peserta didik usia 6 sampai 11 tahun sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021. Vaksin yang mungkin nama lainnya dikenal dengan nama imunisasi telah lama ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang berbeda hanya jenis vaksin, dosis dan tujuan pemberlakuannya. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Penetapan keenam jenis vaksin itu didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang meliputi vaksin dengan jenis Bio Farma (Persero), Astra Zeneca Oxford, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac (Umah & Cahyono, 2014).

Harus diakui, karakteristik penyebaran Covid-19 dengan nama ilmiah *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) berlangsung sangat kompleks (Balan et al., 2021). Di Indonesia, tercatat jumlah korban Covid-19 yang terpapar tiap hari terus meningkat, meski angka kesembuhan juga terus meningkat (Kurniawan et al., 2021).

Bukan tidak mungkin bahwa ketersediaan vaksin dapat menjadi salah satu harapan yang dapat menyelamatkan warga Indonesia dari bahaya Covid-19 termasuk bagi generasi muda bangsa Indonesia di jenjang sekolah dasar (Hamna & BK, 2021). Pemerintah dalam hal ini telah menyetujui bahwa program vaksinasi bagi anak-anak usia sekolah merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara terhadap akses kesehatan.

Tujuan utama pembelakuan kebijakan vaksinasi oleh pemerintah dalam sektor pendidikan dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 yang dapat menghambat aksesibilitas layanan pendidikan di sekolah (Lasmita et al., 2021). Pemberlakuan kebijakan vaksinasi anak di sekolah seperti yang diberlakukan di beberapa sekolah dasar/ sederajatnya yang ada di Kab. Tolitoli yang tersebar pada 10 kecamatan, bisa saja menimbulkan sejumlah polemik hukum. Polemik hukum terkait dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 muncul ketika pemerintah memberlakukan bagi

setiap warga negara untuk mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya, setiap warga negara termasuk anak sekolahan harus dilakukan vaksinasi (Schechter-Perkins et al., 2022).

Pemerintah menyatakan vaksinasi di masa Pandemi Covid-19 seakan-akan bertendensi kewajiban dengan kesan terdapat sanksi bagi pihak yang menolak untuk divaksin. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan dan kekarantinaan kesehatan. Kewajiban pelaksanaan wajib didasari pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 93 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dari pemberlakuan kebijakan vaksinasi inilah kemudian dianalisis peran kepala sekolah di jenjang sekolah dasar/ sederajatnya yang ada di Kab. Tolitoli didalam merealisasikan kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi anak di satuan pendidikan yang dikelolanya.

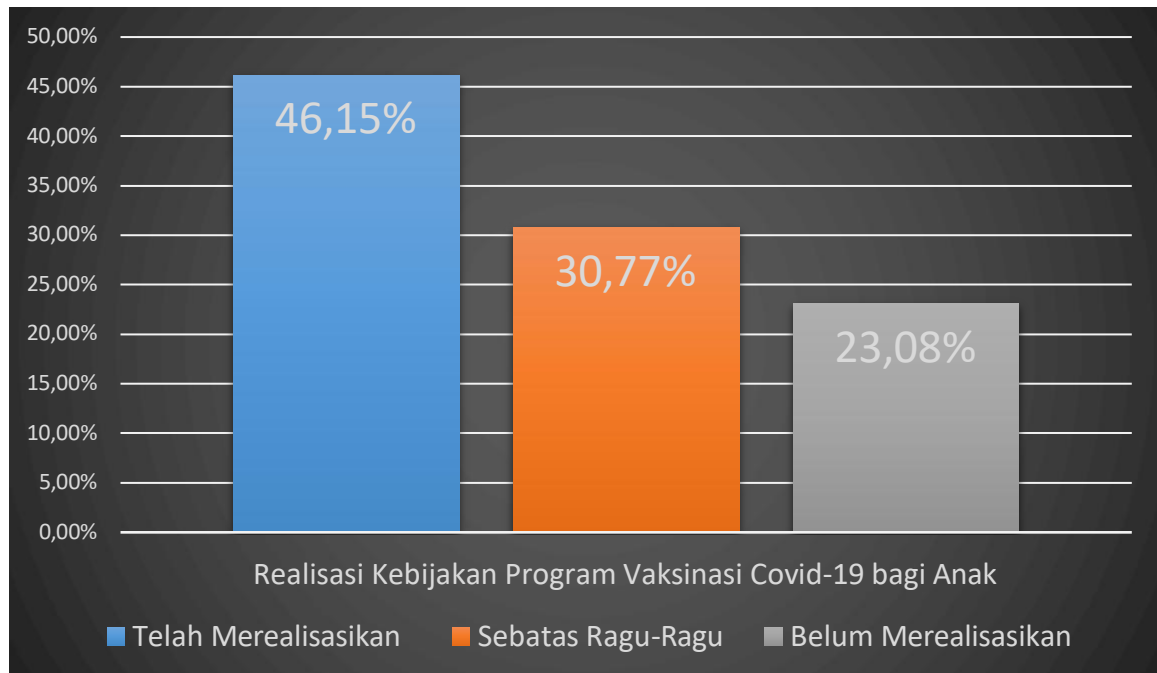
Hasil penelitian menunjukkan ada 26 kepala sekolah swasta dan 52 orang tua/wali siswa yang berpartisipasi sebagai responden penelitian. Dari 26 sekolah swasta kategori jenjang sekolah dasar/ sederajatnya yang ada di Kabupaten Tolitoli, terdapat: (a) 12 sekolah swasta jenjang sekolah dasar/ sederajatnya telah mensosialisasikan kebijakan vaksinasi tersebut di satuan pendidikannya (46,15%); (b) Terdapat 8 sekolah masih sebatas ragu-ragu (30,77%); dan (c) Terdapat 6 sekolah belum mensosialisasikan (23,08%).

Tabel 1. Data Hasil Realisasi Program Vaksinasi Covid-19 bagi Anak di Sekolah Dasar/ Sederajatnya Kategori Sekolah Swasta se-Kab. Tolitoli

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Terlaksana	Ragu-Ragu	Tidak Terlaksana
1	MIS Darul Ihsan	Dampal Selatan	✓		
2	MIS DDI Baung	Dampal Selatan		✓	
3	MIS DDI Kambuno PT	Dampal Selatan	✓		
4	MIS DDI Paddumpu	Dampal Selatan			✓
5	MIS DDI Pallabulu	Dampal Selatan		✓	
6	MIS Nurul Ilmi	Dampal Selatan		✓	
7	SD Muhammadiyah Soni	Dampal Selatan	✓		
8	MIS Darul Naim Lais	Dondo			✓
9	MIS Al-Hikmah Batunubotak	Baolan	✓		
10	MIS Alkhairaat Sidoarjo	Baolan	✓		
11	MIS DDI Siapo	Baolan	✓		
12	MIS Inklusi Alfalah	Baolan	✓		
13	SD Integral Rahmatullah	Baolan	✓		
14	SD Islam Mujahidin	Baolan	✓		

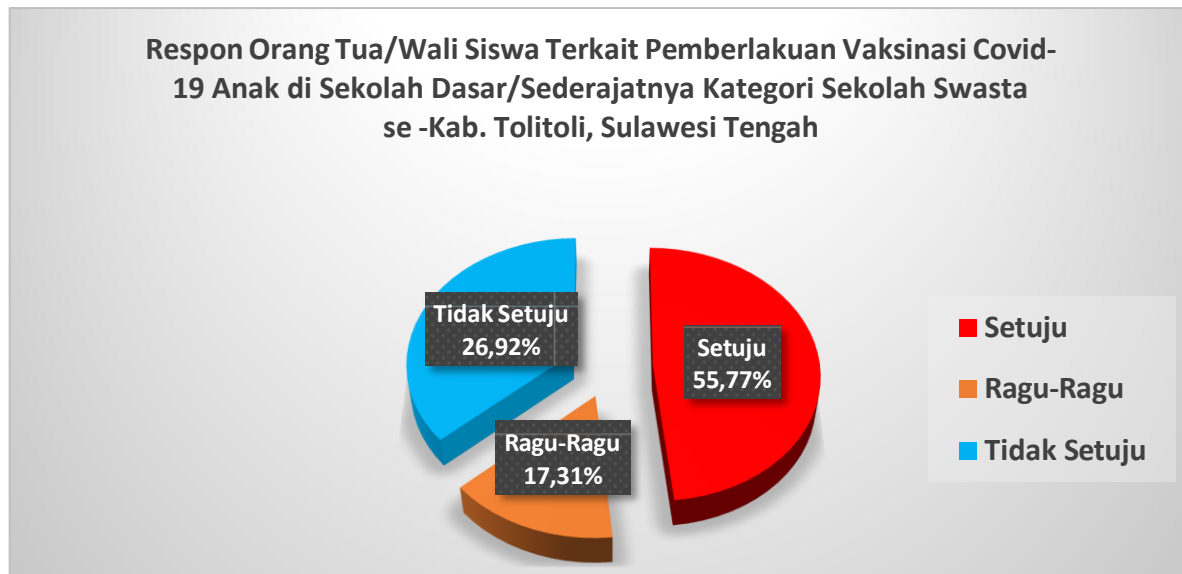
15	SD Islam Nurul Ihsan	Baolan		✓
16	SD Islam Terpadu Rabbani	Baolan	✓	
17	SDS IT Al-Wahda	Baolan		✓
18	MIS DDI Singga	Galang		✓
19	MIS DDI Teluk Bone	Galang	✓	
20	SD Al Ihsan	Galang		✓
21	MI Hi. Hayyun Salumpaga	Tolitoli Utara		✓
22	MIS Nurul Ihsan Buga	Ogodeide	✓	
23	MIS Al-Ma'ruf Oyom	Lampasio		✓
24	MIS Alkhairaat Sulusu Lanang	Lampasio		✓
25	MIS Al-Irsyad	Dako Pemean		✓
26	SD DDI Kapas	Dako Pemean		✓
Jumlah Data			12	8
				6

Sumber Data: Hasil Penelitian 26 Desember 2021 sampai 23 Mei 2022



Gambar 1. Data Hasil Realisasi Program Vaksinasi di Sekolah Dasar/Sederajatnya se-Kab. Tolitoli

Responden penelitian dari pihak orang tua/wali siswa yang menyetujui pemberlakuan vaksinasi anak di sekolah dasar 29 orang (55,77%), terdapat 9 orang yang masih ragu-ragu (17,31%), dan sebanyak 14 orang (26,92%) yang dengan tegas menolak program vaksinasi Covid-19 anaknya dengan mempertimbangkan karakter anak masih di bawah umur.



Gambar 2. Respon Orang Tua/Wali Siswa Terkait Program Vaksinasi Covid-19 bagi Anak

Strategi manajerial kepala sekolah dalam upaya merealisasikan program vaksinasi Covid-19 diantaranya: (1) Strategi sosialisasi program vaksinasi Covid-19 yang aman dengan menghadirkan pihak kepala sekolah berserta jajarannya, tenaga medis, dan orang tua/wali siswa; (2) Analisis situasi dan evaluasi program aman vaksinasi bagi anak; (3) Kepala sekolah berperan sebagai motivator yang menjamin keamanan vaksinasi Covid-19 bagi anak.

Mengacu pada apa yang dinyatakan dalam UUD NRI 1945, bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa vaksinasi bagian dari pelayanan kesehatan yang merupakan hak bagi setiap orang untuk memperolehnya. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kewajiban memiliki arti harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) sedangkan hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima.

Pada prinsipnya, setiap orang berhak untuk memilih pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara letterlijk vaksinasi Covid-19 adalah sebuah hak individu sebagai bagian pemilihan pelayanan kesehatannya sendiri. Namun jika digunakan kontruksi hukum secara sistematis (mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan secara komprehensif) dan kontekstual (kondisi aktual), maka hak individu terkait vaksinasi Covid-19 akan bertransformasi sebagai hak publik tatkala dihubungkan dengan kondisi darurat kesehatan dan wabah penyakit

menular yang memiliki implikasi pada pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat luas yang mana konsekuensi tersebut menjadi tanggungjawab konstitusional pemerintah.

REFERENSI

- Astuti, N. P., Nugroho, E. G. Z., Lattu, J. C., Potempu, I. R., & Swandana, D. A. (2021). Persepsi Masyarakat terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 13(3), 569–580. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i3.1363>
- Bălan, A., Bejan, I., Bonciu, S., Eni, C. E., & Ruță, S. (2021). Romanian medical students' attitude towards and perceived knowledge on covid-19 vaccination. *Vaccines*, 9(8), 1–12. <https://doi.org/10.3390/vaccines9080854>
- Coleman, B. L., Fischer, K., Maunder, R., Kim, J., Straus, S., Bondy, S., & McGeer, A. (2022). Study of the epidemiology of COVID-19 in Ontario elementary and secondary school education workers: an interim analysis following the first school year. *Canadian Journal of Public Health*, 113(2), 185–195. <https://doi.org/10.17269/s41997-022-00613-z>
- Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 508–524. <https://doi.org/http://doi.org/10.47652/metadata/v3i2>
- Hamna, & BK, M. K. U. (2021). *Implementation of Lesson Study Based Collaborative Learning : Analysis of Improving Science Learning Achievement of Elementary School Students during Pandemic Covid-19*. 4(3), 233–244. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/ijeca.v4i3.5763>
- Ichsan, D. S., Hafid, F., Ramadhan, K., & Taqwin, T. (2021). Determinan Kesiapan Masyarakat menerima Vaksinasi Covid-19 di Sulawesi Tengah. *Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.33860/jik.v15i1.430>
- Ikbal. (2022). Pengaruh Penggunaan Explainer Video Terhadap Peningkatan Minat Belajar Siswa Smk Negeri 1 Tolitoli. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madako*, 1(2020).
- Kartikawati, L., Kusrini, K., & Luthfi, E. T. (2022). Algoritma K-Means pada Pengelompokan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Sesudah Vaksinasi COVID-19. *Jurnal Eksplora Informatika*, 11(1), 20–28. <https://doi.org/10.30864/eksplora.v11i1.560>
- Kemendes. (2021). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/6688/2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Anak Usia 6 (Enam) Sampai dengan 11 (Sebelas) Tahun. 2019*.
- Kurniawan, A. H., Elisya, Y., & Marsa, M. F. (2021). Pengkajian Pengetahuan, Sikap dan Determinasi Niat Penerimaan Vaksin Covid-19 Pada Warga Kelurahan Pejuang Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Manuntung*, 7(2), 189–201. <https://jurnal.akfarsam.ac.id/index.php/jim/article/view/491/221>
- Kwok, K. O., Li, K. K., Wei, W. I., Fong Tsoi, M. T., Tang, A., Lam, H. S., McNeil, E. B., & Shan Wong, S. Y. (2022). Likelihood of COVID-19 vaccination among primary school students in Hong Kong. *Clinical Microbiology and Infection*, 28(1), 142–144. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2021.09.029>
- Lasmita, Y., Misnaniarti, M., & Idris, H. (2021). Analisis Penerimaan Vaksinasi Covid-19 Di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Kesmas (Kesehatan Masyarakat) Khatulistiwa*, 8(4), 195. <https://doi.org/10.29406/jkmk.v8i4.3056>
- Muspawi, M. (2020). Strategi Menjadi Kepala Sekolah Profesional. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 402. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.938>
- Prawoto, I., Rohmah, S. N., & Sunarya, F. R. (2020). Peran Preventif Pemimpin dalam

- Pencegahan Penyebaran COVID-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun di Ma'had Al-Zaytun dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5), 403–422. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15571>
- Putri, K. E., Wiranti, K., Ziliwu, Y. S., Elvita, M., Frare, D. Y., Purdani, R. S., & Niman, S. (2021). Kecemasan Masyarakat Akan Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKI)*, 9(3), 539–548. e-ISSN 2655-8106 p-ISSN2338-2090
- Rozi, F., Ahmad, Z., & Masykuroh. (2021). Strategi Kepala Sekolah dalam Menerapkan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Anak*, 10(1), 59–68. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/view/39788>
- Schechter-Perkins, E. M., Van Den Berg, P., & Branch-Elliman, W. (2022). The Science behind Safe School Re-opening: Leveraging the Pillars of Infection Control to Support Safe Elementary and Secondary Education during the COVID-19 Pandemic. *Open Forum Infectious Diseases*, 9(3). <https://doi.org/10.1093/ofid/ofab134>
- Tolitoli, B. (2021). Intruksi Bupati Tolitoli Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Masa Pandemi Covid-19 pada Satgas Pendidikan di Kabupaten Tolitoli. *Dokumen Pemerintah Kabupaten Tolitoli*, 1–3. <https://www.lidikinvestigasi-ri.com/2021/08/bupati-tolitoli-instruksikan-kadis.html>
- Umah, N. T., & Cahyono, R. (2014). Gambaran Keterlibatan Orang Tua Penyintas Covid-19 dalam Mempersiapkan Adaptasi Anak Sekolah Dasar pada Pembelajaran Tatap Muka. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v3i2.517>
- Utamajaya, J. N., Manullang, S. O., Mursidi, A., Novindari, H., & BK, M. K. U. (2020). Investigating the Teaching Models, Strategies and Technological Innovations for Classroom Learning after School Reopening. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, 17(Vol. 17 No. 7 (2020): PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology), 13141–13150. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5063>
- Yarman, C. I., Wapada, W., & Rahayu, S. (2022). Analisis Perilaku Pemberian Vaksinasi Covid-19 Pada Anak Usia 6-11 Tahun Di Sekolah Dasar Negeri 03 Cempaka Putih Jakarta Timur Tahun 2021. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(1), 87. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i1.6555>
- Yoma Bagus Pamungkas, Ami Saptiyono, & Edi Nurwahyu Julianto. (2022). Strategi Komunikasi Publik Relation Dinas Kesehatan Kota Semarang dalam Mensosialisasikan Vaksinasi Covid-19 pada Anak Melalui Official Akun Instagram. *Dinamika Sosial Budaya*, 33(1), 1–12. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/4669/2611>